

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Ada tiga unsur utama desa, yaitu (1) Daerah yaitu suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya. (2) Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya. (3) Tata Kehidupan berkaitan erat dengan adat istiadat, norma dan karakteristik misalnya bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatannya dengan budaya lain (R. Bintarto, 2015:6)

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa

Dalam melaksanakan kegiatannya sebuah desa memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab. Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Kewenangan asli Pemerintah desa merupakan kewenangan utama desa dalam menyelenggarakan rumah tangga desa, sehingga kewenangan desa yang bersifat pelimpahan dan pemberian dari pemerintah atasan, pada dasarnya merupakan kewenangan tambahan karena pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan secara nasional. Kewenangan pemerintah desa itu meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Sesuai dengan Nomor 37 Tahun 2014 pasal 12 ayat 3 bagian pertama penatausahaan penerimaan, yaitu bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Karena dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan, bukan untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas saja tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan, salah satu diantaranya adalah pemerintah desa

Pemerintah desa wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan pengembangannya, khususnya dibidang akuntansi pemerintahan yang berkesinambungan sangat diperlukan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. (Mardiasmo, 2004:35)

Proses akuntansi atau tata keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Institusi-institusi pemerintahan saat ini harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum

menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah desa mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi. (Andriani, 2010)

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal atau reliabilitas, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. (Herawati, 2014)

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah dihasilkannya laporan keuangan yang memenuhi keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Prasetyo, 2005).

Salah satu fenomena yang terjadi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah desa adalah tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban karena mengkorupsi dana bantuan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat bernama Nunung Nurjanah yang melanggar pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat nomor 5

tahun 2012 dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa.

Diduga uang tersebut dipergunakan untuk pribadi dan orang lain. Perbuatan Kepala Desa tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan negara sebesar Rp 250.000.000 sebagaimana audit BPKP.

Pada tanggal 20 Juni 2013, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana desa itu kepada Gubernur Jawa Barat untuk fasilitas infrastruktur pedesaan dan rehab Kantor Desa Situwangi sebesar Rp250.000.000 dengan meminta bantuan dari saksi lain yang bernama Dona Ahmad Muharam agar pencairan dana bantuan tersebut dapat dikabulkan. Berkat aksinya tersebut pencairan dana bantuan dikabulkan berdasarkan surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Barat per 28 Juni 2013 yang menjadikan Desa Situwangi sebagai salah satu desa yang memperoleh bantuan. Sehingga pada bulan September 2013 dana bantuan di transfer ke rekening desa sebesar Rp250.000.000

Selain untuk kepentingan pribadi, Kepala Desa juga memberikan uang sebesar Rp 25.000.000 kepada saksi bernama Dona yang dianggap telah membantu pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. (FOKUSJabar.com, 22 Februari 2016).

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, maka masyarakat harus turut berperan langsung dalam mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana

Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang setiap tahun disalurkan pemerintah bertujuan untuk menunjang roda pemerintah desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun penggunaan dana desa tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal untuk memperkaya diri sendiri. (Sherly Gresita Apriliani, 2014)

Fenomena lainnya terjadi di Wonogiri, Bagian Pemerintah Desa (Pemdes) Sekda Wonogiri, Suharno melakukan pemanggilan serta memberikan peringatan secara lisan kepada ratusan Kades dan Ketua BPD lantaran banyak terjadi kasus keterlambatan penyampaian Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemdes menduga hal itu terjadi lantaran perangkat desa selaku pembuat Surat Pertanggungjawaban malas untuk mengerjakannya secara tepat waktu. Pemanggilan kepada ratusan Kades Dan Ketua BPD ini bagian dari upaya Pemkab Wonogiri mengontrol sekaligus menyelamatkan agar dana desa tidak diselewangkan oknum perangkat desa serta memberikan pemahaman agar Kepala Desa segera membuat SPj dana desa tahun 2015, karena jika sampai SPj 2015 belum dibuat maka otomatis dana desa 2016 tidak mungkin dapat dicairkan.

Seharusnya Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret. Namun, yang terjadi justru banyak yang terlambat. keterlambatan itu murni karna faktor malas untuk mengerjakan secara tepat waktu. Palsunya sumber daya manusia di desa sebenarnya cukup mampu membuat Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara tepat waktu. Keterlambatan kinerja perangkat desa sebenarnya juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten walaupun Pemerintah Desa sudah berulang kali membimbing perangkat

desa agar dapat mematuhi peraturan. Solusinya adalah Pemerintah Kabupaten harus terus menekan perangkat desa agar tidak menyelewengkan dana desa dengan cara apapun serta dapat mengubah pola kerja agar lebih optimal dari sebelumnya. (Timlo.net, 5 April 2016)

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Dian Tri Anggraeni dan Akhmad Ridwan, 2014) karena dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa akan membantu pemerintah mempercepat proses pengolahan data dan penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas.

Berdasarkan PP Nomor 192 Tahun 2014 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa adalah suatu aplikasi yang dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dan menghasilkan informasi keuangan desa yang komprehensif, tepat, dan akurat kepada para *stakeholder*.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dapat berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan (Aren, 2008) karena SPIP menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan

pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi pada laporan keuangan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Sudarmanto, 2009:12) karena dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas.

Menurut Sutrisno (2010:3) Sumber Daya Manusia merupakan satu satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan,

dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencaapi tujuan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Cipmawati Mohune (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo), Dan Bayu Dharma Putra (2015) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus di Kota Padang).

Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada variabel yang diteliti, waktu dan lokasi penelitian. Perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap beberapa variabel yang menjadi penelitian penulis. Perbedaan waktu dan lokasi penelitian akan berpengaruh terhadap analisis deskriptif mengenai bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kualitas Laporan Keuangan, serta lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. Perbedaan lokasi ini juga berpengaruh terhadap salah satu variabel yang diteliti oleh penulis yaitu kualitas laporan keuangan. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo serta dilakukan di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (Survey di Kabupaten Bandung barat)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa di Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bandung Barat.
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat secara parsial.

6. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat secara simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengelola data dan menganalisis kemudian ditarik kesimpulan, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa di Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat.

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat secara parsial.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk beberapa pihak diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai pengaruh atas penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) desa, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP),

dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pada Kecamatan-kecamatan di daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bagi Kecamatan-kecamatan di Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan serta masukan yang positif dalam melakukan evaluasi yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian dimasa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu Sistem Informasi Akuntansi, khususnya pengaruh atas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun waktu penelitian, penulis akan melaksanakan penelitian di tahun 2017.